

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Satu Tahun UU Industri Pertahanan: Meneropong Kekuatan Alutsista Indonesia

Pengantar diskusi oleh:

1. **Jaleswari Pramodhawardani (Peneliti Senior LIPI)**

Moderator : Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Program The Indonesian Institute

Partisipan :

Peserta yang hadir +/- 23 orang. Peserta dari berbagai kalangan akademisi dari Universitas Brawijaya, UI dll. Dari Kalangan jurnalis dari Kabar24.com, Tribun Rakyat dll. Dari pihak lain seperti Antam, PT DI, Inesign, PT One Plus dan dari Pemerintah dari Kementerian Luar Negeri, dan juga ada perwakilan Kedutaan Inggris.

PEMBAHASAN

Moderator membuka diskusi dengan mengemukakan bahwa diskusi kali ini adalah seri yang ke-27 dan tema yang diangkat adalah Pluralisme. Di awal moderator menyatakan bahwa isu pluralisme yang terakhir misalnya soal Sampang, itu bukanlah isu yang baru. Beberapa tahun belakangan ini, isu-isu ini terus berkembang, bukan hanya dalam kehidupan kemasyarakatan secara umum namun juga situasional misalnya pada saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

- (1) Jaleswari Pramodhawardani.** Bicara satu tahun UU Inhan artinya kita juga bicara tentang salah satu UU sebagai produk legislasi yang diinisiasi oleh DPR. Ada beberapa persoalan terkait isi UU Inhan itu sendiri juga adalah bagaimana implementasi dari program dan penganggaran dari pengembangan industry pertahanan ini.

Di dalam UU ini disebut kita akan menuju kemandirian industry pertahanan. Ada tiga pilar dari Inhan ini yaitu Pengguna, kedua adalah ekspor dari alutsista kita ke luar negeri, kemudian ada pemerintah dan kemudian ada BUMN dari industry strategis. Dari satu tahun UU inhan ini kata kemandirian ini menjadi problematik, karena kata kemandirian ini mengaju pada kapabilitas produksi kita, kapasitas negara kita untuk menyediakan finansial sistem senjata itu dan kemudian semua itu harus tertuang dalam rencana jangka panjang dari negara tersebut.

Salah satu contoh negara yang memiliki rencana jangka panjang terkait industry pertahanan ini adalah dari China yang sudah memiliki rencana hingga 2050. Terlihat bagaimana strategi jangka panjang itu diikuti dengan roadmap yang jelas. Jadi kita bukan hanya bicara tentang industry pertahanan itu sendiri tapi juga harus bicara tentang postur pertahanan kita sendiri dan juga bicara tentang industry secara umum di negara kita sendiri.

Hal lain adalah bahwa terkait industry pertahanan saat ini berbeda dengan industry pertahanan pada saat perang. Dan pada semua negara itu saat ini budget untuk ini diperkecil. Hal lain yang juga harus diingat yaitu bahwa industry pertahanan berbeda dengan industry lain. Ini adalah industry yang tidak dengan secara langsung bisa dilihat hasilnya.

Jika kita lihat lagi di dalam UU Industri Pertahanan, terkait kemandirian itu juga haruslah berkorelasi dengan kondisi kekinian di negara kita dan ada 7 negara yang diprediksi bisa memiliki Inhan yang baik yaitu Indonesia, Amerika, India, China, Eropa Barat, Brazil. Artinya kita diperhitungkan. Jika Amerika dan China sudah mandiri sejak dari sekarang karena potensi keuangan mereka banyak. Lalu bagaimana dengan di Indonesia?

Untuk Indonesia itu bukan hanya soal keuangan, walau memang beberapa perusahaan kita selalu merugi. Saat ini kita menjalin banyak kerja sama dengan negara lain untuk mempersiapkan kemandirian di dalam industry pertahanan ini. Hal ini karena kita ada kendala terkait bahan baku di industry tersebut, walaupun di UU Inhan itu disyaratkan harus ada 30 persen bahan baku dari dalam negeri.

KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) juga menjadi sorotan karena dia berwenang dari proses perencanaan hingga pengawasan dan terkesan menjadi badan yang superbodi. Hal lain yang masih menjadi kendala buat pengembangan inhan kita adalah belum adanya *techni ideology*, kultur teknologi dan bisnis juga belum terlaksana semua. Sehingga semua Road Map yang sudah kita miliki itu bisa diimplementasikan.

FORUM DISKUSI

Mahesa (UI). Baru baru ini pertanggal 1 Agustus 2013, kita Indonesia itu sudah dikategorikan sebagai negara nomor 15 di jajaran militer dunia, itu naik dari tahun lalu dari peringkat 18 dan ini kita kalahkan Australia yang di peringkat 18 dan Singapura di peringkat 47. Apakah ini bisa kita jadikan alasan objektif bahwa pada 2029 kita bisa mencapai MEF.

Kemudian terkait paradigam penguatan pertahanan yang berbeda dari kita dan juga dari penyelenggara negara kita.

Arfianto (TII). Terkait postur pertahanan kita. Bicara industry pertahanan itu bukan hanya soal industry pertahanan. Terkait kebutuhan industry pertahanan, apakah alutsista kita bisa untuk membentengi daerah perbatasan kita.

Kemudian, apakah penting kita punya industry pertahanan ini, ataukah lebih baik kita import saja dan mempersenjatai negara kita.

Tanggapan pengantar diskusi:

Jaleswari Pramodhawardani. Kita harus berhati-hati melihat segala peringkat terkait industry pertahanan ini, ini tergantung indikator yang dipakai. Misalnya dari Globalfire.com tadi, itu mereka memasukkan banyak variable seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan lain sebagainya. Misalnya di sana dibilang bahwa kita diperingkat 15 dan Singapura di peringkat 47. Ini perlu hati-hati dilihat.

Hal penting yang juga dilihat adalah perbandingan kondisi alutsista kita saat ini dibanding beberapa tahun belakangan. Saat ini memang kita sudah lebih modern dan lebih baik. Tapi jika dibandingkan dengan negara lain, masih belum tentu.

Kritikan kita selama ini bahwa alutsista kita jelek, masih belum modern dan sebagainya. Dan ini yang seharusnya bisa kita ubah. Dan hal baik yang sudah dibuat adalah adanya Roadmap terkait tapi implementasinya belum.

Kemudian terkait zero enemy. Ini menjadi controversial, karena tidak mungkin saja. Pembacaan terhadap zero enemy ini mungkin yang harus kita ubah. Mungkin ini agar konflik antar negara dibawa ke ranah diplomacy dan bukan perang. Artinya di dunia yang semakin berubah ini, kita harus punya strategi misalnya tetap bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan Amerika dan China pada waktu yang bersamaan apa tidak.

Industri strategis itu pentingkah? Penting dan kita harus lihat industry pertahanan yang seperti apa. Misalnya kita kembangan dengan yang dilakukan oleh negara lain yang beli saja semua alutsista ini. Saya rasa jika kita ingin tetap memiliki kemandirian industry pertahanan maka kita penting punya roadmap jangka panjang terkait ini dan diikuti dengan aktivitas-aktivitas yang konkret. Kemudian implementasi adalah hal yang sangat penting harus diperhatikan. Jadi dari planning, programming dan budgeting itu penting.

Terkait wilayah perbatasan, kita sering ditawarkan kita mau beli kapal patrol atau kapal induk. Kalau kita punya uang itu bisa semua, tapi juga terkait dengan fokus atau prioritas dari penggunaan keuangan itu. Tapi masalah perbatasan itu bukan hanya soal pertahanan tapi juga kesejahteraan dan masalah klasik yang selalu ada adalah masalah koordinasi antar lembaga terkait.

Amo (Fisip UI). Kita coba bangun industry pertahanan tapi kita saja masih impor kedelai. Hubungan antara pertahanan dan ekonomi ini tidak bisa dipisahkan, apalagi yang menyangkut industry pertahanan. Kita sebenarnya mau apa? Kita buat industry pertahanan ini maunya ke luar, tapi di dalam saja untuk misalnya mengendalikan gerakan separatis di dalam negeri saja kita belum bisa.

Andrea (Unibraw). Pertama masalah skala prioritas dari kebijakan ini ada dimana? Ada di modernisasi? itu yang mana? AD/AL/AU? Kemudian seperti kita ketahui terkait militer itu selama ini ada di pemerintah, bagaimana kemungkinan agar swasta juga dilibatkan.

Jaleswasi Pramodhawardani. Ada istilah Gun versus Butter, ini tak bisa kita pisahkan. Pertahanan yang stabil itu akan memperkokoh perekonomian negara kita. Bicara pertahanan bukan hanya bicara untuk mengamankan negara kita tapi kita juga bicara tentang human security. Kalau bicara ini memang tidak ada habisnya, tapi bagaimana menguatkan negara lewat pertahanan dan militernya itu betul juga. Terkait anggaran bagaimana penggunaannya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tapi memang kemudian juga belum maksimal. Kita lihat bagaimana ketimpangan terus terjadi di Papua, Aceh dan sebagainya.

Saat ini kebijakan di TNI bahwa penambahan jumlah Prajurit nol. Artinya yang masuk dan pension sama. Hal yang perlu dilihat juga bahwa mengukur jumlah prajurit TNI tidak sama dengan polisi yang memperhitungkan jumlah penduduk. Bisa jadi jumlah prajurit kita sudah cukup tapi alatnya yang perlu dimodernisasi. Kemudian hal lain yang harus kita lihat juga adalah bahwa cyber criminal itu jauh lebih penting. Ada hacker-hacker yang bisa melumpuhkan sistem sistem pertahanan ini. Dan terkait wacana komponen cadangan mungkin para hacker ini adalah yang dimaksud.

Trina (LIPI). Menjadi perhatian untuk kita di industry pertahanan ini adalah soal alih teknologi. Apakah ada negara yang mau alih teknologi ke kita apalagi soal pertahanan ini? Support untuk pertahanan ini yang real dari pemerintah itu seperti apa? Kalau dari UU itu ada, seperti UU Inhan yang sekarang kita bahas. Di dalam UU ini ada industry alat utama yang adalah dipegang oleh pemerintah dan yang lain oleh sektor swasta. Apa respon di dalam satu tahun ini terhadap hal-hal ini.

Seno. Tadi di awal memaparkan kabar buram tentang industry pertahanan ini, apa ada kabar baik dari industry ini? Kalau kita bicara dana dukung sebenarnya seberapa besar daya dukung yang kita miliki untuk membuat ini.

Agus Santoso (DI). Kalau saya lihat mengejutkan kalau pertahanan kita di peringkat 15. Ada satu hal, industry pertahanan harus maju dan peralatan pertahanan kita harus tampak kuat, sehingga jika ada penyusupan misalnya dari Malaysia itu mereka akan juga melihat hal ini. Industri pertahanan ini harus kita tingkatkan, tapi masalahnya memang adalah komitmen dari negara dan juga dari masyarakat kita sendiri.

Misalnya jika Pindad buat, itu apa iya ada jaminan akan dibeli oleh pemerintah kita dan bukannya orang luar dan kemudian kita malah impor. Terkait masyarakat, itu juga harusnya terbangun image positif bahwa industry pertahanan itu penting bagi kita semua.

Budi. Ada Alutsista yang akan didatangkan di Sulawesi Selatan. Nah itu apakah sudah cover untuk daerah yang di Australia, Timor Leste dan Guam. Riset untuk tentara, harusnya juga menetapkan bidang lain misalnya neuro sains dan akan mempengaruhi cara pikir tentara.

Jaleswari Pramodhawardani. Transfer of technology itu sebuah keniscayaan. Misalnya saja di Amerika itu yang melibatkan swasta dalam industry pertahanan itu dilakukan. Ini ibarat bonus yang diberikan dibandingkan dengan banyaknya pemain di bidang ini. Maka hal ini harus dilakukan. Kita sering mengkritik

bahwa pemerintah beli Sukhoi tapi tak ada senjatanya. Ketika kita bicara soal alutsista kita bukan hanya bicara tentang fisiknya tapi juga lebih di dalamnya.

Ada klausul menarik dalam industry pertahanan kita adalah bahwa sejauh mana TNI gunakan senjata yang sudah bisa kita produksi ini. Ini semacam affirmative action untuk industry pertahanan kita.

Kabar baik ada di industry pertahanan ? Waktu ada LOI dengan IMF bahwa kita harus batasi ini itu membonsai industry pertahanan kita. Banyak juga dari produk dari industry pertahanan kita yang sudah diekspor ke banyak negara (Korsel, Filipina, Malaysia dll).

Salah satu kabar baik nya adalah ketika kita punya Roadmap, kita ada planning, programming dan budgeting yang jelas. Tapi hal penting nya adalah bahwa kita butuh leadership yang kuat. Ketika bicara alutsista itu juga bicara prioritas penggunaan anggaran kita untuk apa. Hal ini kemudian penting, bahwa DPR bergaransi di dalam pasal di UU agar bisa mengukuhkan aturan ini dan tidak bisa diubah begitu saja.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH